

ABSTRAK

Di Indonesia badan usaha yang menangani jasa telekomunikasi di kenal dengan nama PT. Telekomunikasi Indonesia. Badan usaha ini bernaung di bawah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Deparpostel). Telkom merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tunggal yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan serta mengelola jasa telekomunikasi dalam negeri.

Salah satu bentuk layanan komunikasi bagi masyarakat ialah dengan penyediaan telepon umum, baik itu telepon umum koin maupun telepon umum kartu. Pengakuan pendapatan untuk telepon umum kartu ialah pada saat penjualan kartu dilakukan. Di sini nampak bahwa ada ketidakseimbangan, karena pada saat membeli kartu tersebut konsumen masih belum mempergunakan baik sebagian atau seluruhnya, namun telah diakui sebagai pendapatan.

Dari pembahasan yang dilakukan, diajukan alternatif untuk pengakuan pendapatan dan laba berdasarkan pemakaian pulsa (pulsa terekam). Karena dengan berdasarkan pengakuan ini akan dirasa lebih realistis yaitu berapa pulsa yang telah dipergunakan oleh konsumen, maka sebesar itu pula yang seharusnya diakui Telkom sebagai pendapatan dan laporan laba rugi yang disajikan juga tidak menjadi lebih besar.

Setelah dilakukan analisis atas pengakuan pendapatan berdasarkan pemakaian pulsa ditemui beberapa kelemahan antara lain ialah besarnya beban yang dikeluarkan tidak berdasarkan pada pemakaian pulsa (pulsa terekam), persentasi pendapatan untuk telepon kartu hanya sebesar 2,5% dari total pendapatan Telkom membuat selisih pendapatan dan laba yang ditimbulkan menjadi tidak material. Selain itu, secara teknis pengakuan pendapatan dan laba berdasarkan pemakaian pulsa sangatlah sulit dilakukan karena Telkom tidak dapat membedakan apakah kartu yang dipergunakan pada telepon umum kartu di divisi tertentu adalah kartu yang dijual di divisi itu juga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan pengakuan pendapatan dan laba berdasarkan penjualan kartu seperti yang telah dilaksanakan oleh badan usaha akan menunjukkan prinsip penandingan dan menghasilkan laba yang layak bagi badan usaha.